

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir permasalahan lingkungan hidup merupakan isu utama yang terus diperbincangkan masyarakat dunia. Banyaknya kerugian yang terjadi akibat pengelolaan lingkungan yang tidak bertanggung jawab, baik yang dilakukan secara individu atau pun bersifat kelompok dengan mengatasnamakan organisasi. Pengelolaan lingkungan yang tidak disertai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, telah menciptakan malapetaka bagi kehidupan manusia, seperti adanya wabah penyakit akibat limbah, erosi, serta terjadinya perubahan iklim yang mendorong kerugian panen. Salah satu negara yang paling disoroti dunia dalam masalah penanganan lingkungan hidup adalah Indonesia.

Pandangan dalam dunia usaha dimana perusahaan hanya bertujuan untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya tanpa memperhatikan dampak yang muncul dalam kegiatan usahanya kini sudah tidak dapat diterima lagi. Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatiannya kepada lingkungan sosial. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat dan lingkungannya. Kesadaran masyarakat akan peran perusahaan dalam lingkungan sosial pun semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosialnya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi. Pusat perhatian pada akuntansi konvensional adalah *stakeholders* dan *bondholders*, sedangkan pihak lain diabaikan.

Regulasi mengenai CSR sudah mulai digulirkan pada tahun 2007 dengan munculnya Undang-Undang no. 25 yang mengatur tentang Penanaman Modal.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap penanam modal diharuskan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan CSR. Selain itu juga ada Undang-Undang no. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Untoro dan Zulaikha, 2013).

Berkurangnya jumlah hutan lindung di Indonesia juga terjadi akibat adanya kebakaran hutan, yang terjadi akibat adanya proses pembakaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, dampak dari kebakaran hutan, telah menjadi Indonesia sebagai negara penghasil emisi karbon terbanyak di dunia. Terjadinya wabah kabut asap pada beberapa waktu yang lalu juga telah menciptakan sejumlah kerugian baik materi maupun *non financial*. Bahkan Indonesia sempat dijuluki negara kabut asap karena efek kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menyebar hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan masing masing perusahaan wajib melakukan *Corporate social responsibility*. Salah satu kunci untuk meningkatkan *Corporate social responsibility* juga tidak terlepas dari kemampuan manajemen untuk mengelola kinerja keuangan yang fundamental, seperti *leverage* profitabilitas dan *size*. Masing masing rasio pengukuran kinerja memiliki kontribusi yang berbeda bagi eksistensi perusahaan.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan perusahaan. Secara umum, dalam menjabarkan penjualan menjadi laba menunjukan prestasi profitabilitas perusahaan. Maka salah satu tujuan perusahaan yaitu mencapai keuntungan yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham.

Menurut Sartono (2010) *leverage* merupakan alat yang dimiliki *stakeholders* untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dana khususnya hutang dan modal yang dimiliki perusahaan. Rasio tersebut juga sangat penting bagi *stakeholders* untuk mengukur risiko dalam berinvestasi, serta menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan atau pun kegiatan perusahaan lainnya seperti *corporate social responsibility*.

Selain *leverage*, kinerja keuangan lainnya yang memiliki arti penting dalam pengungkapan *corporate social responsibility* adalah profitabilitas. Menurut Ross (2011) *profitabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, setelah memanfaatkan sejumlah sumber daya yang mereka miliki, untuk mengukur profitabilitas salah satu cara yang dapat digunakan adalah menggunakan *return on assets*, sedangkan *size* menunjukkan besar atau kecilnya ukuran sebuah perusahaan, yang dapat diamati dari besarnya nilai total aset yang dimiliki sebuah perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *size*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara?
2. Apakah *size*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *size*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara.
2. Untuk mengetahui apakah *size*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan
2. Ssebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan.
3. Wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter.
4. Memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.